

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo tahun 2013 *Unaudited*, maka peneliti mengambil simpulan bahwa secara umum, penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 *Unaudited* telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Kas Menuju Akrua, namun terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan koreksi. Hal tersebut sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan tidak memperhatikan dokumen sumber tiap transaksi untuk saldo akun yang terdapat kesalahan penyajian nilai;
2. Penyusunan Laporan Keuangan tidak memperhatikan Kebijakan Akuntansi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
3. Penyusunan Laporan Keuangan tidak memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku;
4. Terdapat kesalahan pencatatan pada Laporan Keuangan, baik kesalahan pencatatan angka maupun kesalahan pengklasifikasian akun;
5. Terdapat kekurangan pengungkapan atas penjelasan pada CaLK sehingga tidak memenuhi prinsip *full disclosure* (pengungkapan menyeluruh);
6. Kurangnya pemahaman dari pihak penyusun Laporan Keuangan tentang SAP dan penerapan kebijakan akuntansi;

7. Pemerintah Kabupaten Boalemo belum mempunyai Kebijakan Akuntansi terkait perlakuan, penilaian, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Penyusutan Aset Tetap;

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis akan menyajikan beberapa saran yang mungkin akan bermanfaat bagi pembaca skripsi ini secara umum dan bagi Pemerintah Kabupaten Boalemo secara khusus untuk menyajikan Laporan Keuangan di masa yang akan datang. Saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang menyusun Laporan Keuangan perlu untuk memperhatikan dokumen sumber tiap transaksi yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan, nilai yang terdapat pada dokumen sumber tersebut yang akan dituangkan dalam Laporan Keuangan menjadi suatu informasi untuk pengambilan keputusan untuk pada *stakeholders*, sehingga tidak lagi terdapat kesalahan penulisan nilai/angka/saldo pada setiap akun dalam Laporan Keuangan;
2. Pihak penyusun Laporan Keuangan harus memperhatikan kebijakan akuntansi yang digunakan saat menyusun laporan keuangan, sehingga Laporan Keuangan yang disusun tidak melanggar kebijakan yang dibuat sendiri oleh Pemerintah Daerah;
3. Pihak penyusun Laporan Keuangan harus memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku saat penyusunan Laporan Keuangan. Standar tersebut

- yang menjadi pedoman dalam pengukuran, penilaian, pengungkapan, dan penyajian Laporan Keuangan;
4. Pihak penyusun Laporan Keuangan perlu melakukan jurnal koreksi terhadap semua kesalahan baik kesalahan pencatatan angka maupun kesalahan pengklasifikasian akun yang terdapat pada BAB IV tentang pembahasan di atas;
 5. Pihak penyusun Laporan Keuangan perlu menambahkan penjelasan pada CaLK atas kekurangan pengungkapan untuk memenuhi prinsip full disclosure (pengungkapan menyeluruh);
 6. Pihak Pemerintah Kabupaten Boalemo perlu melakukan konsultasi secara berkala kepada instansi/lembaga pemerintah seperti, BPKP, Kementerian Keuangan, dan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Keuangan;
 7. Pemerintah Kabupaten Boalemo perlu menyempurnakan Kebijakan Akuntansi terkait perlakuan, penilaian, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Penyusutan Aset Tetap. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesulitan saat melakukan konversi Laporan Keuangan dari Basis Kas Menuju Akruwal ke Basis Akruwal.
 8. Jika telah dilakukan jurnal koreksi dan pengungkapan yang menyeluruh atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2013, maka peneliti berpendapat bahwa Laporan Keuangan tersebut telah disajikan secara wajar.